

**BAB II**  
**AKIBAT HUKUM ORANG YANG MENGGADAIKAN MOBIL**  
**DALAM STATUS SEWA**

**2.1. Gambaran Kasus Orang Yang Menggadaikan Mobil (Studi Kasus Putusan PN Nomor 806/Pid/B/2010/PN.Sda.)**

Pada tanggal 10 Agustus 2010 sekitar pukul 19.30 WIB Mamat dan M. Ubaidillah Efendi mendatangi Andi Kusuma di rumahnya yaitu di Jl. Wijaya Kusuma Perum Wisma Tropodo Waru Sidoarjo dengan maksud menyuruh Andi Kusuma mencari pembeli Avanza warna putih No. Pol W-2367-SA yang pada waktu itu juga dibawa kerumah Andi Kusuma. Andi Kusuma mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik Cycilia Cyntia Soemamo yang disewa oleh M. Ubaidillah Efendi bersama-sama dengan Agus Sumaryanto beberapa hari sebelumnya. Andi Kusuma mencari pembeli sesuai perintah atau permintaan Ubaidillah Efendi dengan harapan setelah dapat pembeli dan mobil tersebut laku, Andi Kusuma akan mendapatkan imbalan sejumlah uang. Setelah seharian kemudian Andi bertemu Dwi Wahyu Faria Wanto calon pembeli dan disitu Andi dan Dwi mengadakan perjanjian untuk bertemu dan melihat mobil yang hendak dijual tersebut. Andi Kusuma lalu menghubungi Mamat. untuk datang kerumah Andi. Pada Selasa tanggal 13 Agustus 2010, M. Ubaidillah Efendi dan Agus Sumaryanto datang kerumah Andi Kusuma dan menemui Dwi Wahyu Faria Wanto yang hendak membeli mobil tersebut, selanjutnya diadakan transaksi

di depan Perum Kartika Ds. Sedati Sidoarjo. Ditempat tersebut bukan transaksi jual beli melainkan terjadi transaksi pinjam meminjam uang dengan jaminan mobil Avanza No. Pol W-2367-SA yang hendak dijual tersebut. Dwi Wahyu menyanggupi meminjamkan uang dengan jaminan mobil tersebut seharga Rp 20.000.000,- selanjutnya mobil diserahkan kepada Dwi Wahyu tanpa dilengkapi surat-suratnya (BPKB) dan Dwi Wahyu menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi akan dibayarkan belakangan. Dari hasil pengadaan mobil tersebut Andi Kusuma mendapat bagian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), M. Ubaidillah mendapat bagian Rp. 4.350.000,- dan Agus Sumaryanto mendapat bagian sejumlah Rp. 4.500.000,-

Cycilia Cyntia Soemamo tahu bahwa mobil yang disewa oleh M. Ubaidillah Effendi dan Agus Sumaryanto tidak akan dikembalikan karena telah digadaikan kepada orang lain, maka Cycilia Cyntia Soemarno sebagai pemilik mobil melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi. Setelah mendapat laporan, Kepolisian bertindak cepat dan menangkap orang-orang yang terlibat dalam penggelapan mobil tersebut. Dari keempat orang pelaku penggelapan mobil tersebut 3 orang ditangkap Polisi. Mereka adalah M. Ubaidillah Effendi, Agus Sumaryanto dan andi Kusuma, satu orang yang melarikan diri yaitu Mamat, dan menjadi buronan Polisi. Kasus ini diadili pada Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Cycilia Cyntia Soemamo sebagai pemilik mobil, yang disewa oleh Mamat (belum tertangkap) dan M. Ubaidillah Efendi. Mamat dan M. Ubaidillah Efendi mempunyai niat untuk menjual mobil tersebut, kemudian menghubungi Andi Kusuma, namun karena tidak ada yang membelinya, kemudian disepakati mobil digadaikan oleh Andi Kusuma kepada Dwi Wahyu Faria Wanto.

## **2.2. Putusan PN Nomor 806/Pid/B/2010/PN.Sda.**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, dalam perkara terdakwa : Andi Kusuma; telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Andi Kusuma, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”menggadaikan mobil sewa” sebagaimana pasal 480 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Kusuma, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebankan biaya perkara kepada teerdakwa sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan :

Andi Kusuma telah melakukan tindak pidana penadahan dan melanggar pasal 480 KUHP.

Ketentuan pasal 480 KUHP diawali dengan kata "barangsiapa" yaitu pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum. Pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang menentukan:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atas martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 KUHP di atas berkaitan dengan pelaku tindak pidana baik kejahatan atau pelanggaran, yang berarti tidak membedakan antara pelaku tindak pidana atas dasar kejahatan maupun pelanggaran.

Pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 KUHP di atas dibedakan menjadi empat bagian, yaitu:

- a. orang yang melakukan (*pleger*),
- b. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*),
- c. orang yang turut melakukan (*mede pleger*) dan

d. orang yang dengan pemberian upah (*uitlokker*).<sup>44</sup>

Pada kasus gadai mobil sewa tersebut sebagai pelaku adalah M. Ubaidillah Effendi dan Agus Sumaryanto yang berposisi sebagai penyewa mobil milik Cycilia Cyntia Soemamo. Keduanya telah merencanakan bahwa mobil yang disewa akan dijual atau digadaikan. Melalui atau dengan perantaraan Andi Kusuma mobil tersebut digadaikan kepada Dwi Wahyu Fariawanto. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 KUHP sebagaimana tersebut di atas, M. Ubaidillah Effendi dan Agus Sumaryanto sebagai pelaku atau pihak yang menggadaikan mobil sewa tersebut. Peristiwa menggadaikan mobil tidak akan terjadi tanpa ikutsertanya Andi Kusuma, yang berarti bahwa M. Ubaidillah Effendi dan Agus Sumaryanto sebagai pelaku sedangkan Andi Kusuma sebagai pihak turut serta melakukan tindak pidana menggadaikan mobil sewa.

Turut mengerjakan terjadinya tindak pidana berarti bersama-sama dengan orang lain atau orang-orang lain mewujudkan tindak pidana.

Dalam mewujudkan tindak pidana itu ada 3 kemungkinan.

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.

Mereka ini masing-masing dapat juga disebut melakukan delik.

2. Salah seorang memenuhi rumusan delik/unsur-unsur dan ada orang lain turut serta.

3. Tidak seorangpun melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

---

<sup>44</sup> Sugandhi, *KUHP dengan Penjasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1989, h. 68-70.

Untuk adanya turut serta melakukan diperlukan dua syarat:

- 1) adanya kerjasama secara sadar;
- 2) adanya pelaksanaan bersama-sama *physik* (jasmaniah)

Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan yang terlarang. Kesengajaan ditujukan kepada :

- 1) menggerakkan orang lain untuk berbuat
- 2) terjadinya tindak pidana

Mengenai terjadinya tindak pidana perlu dikemukakan bahwa menurut kata-kata dari undang-undang yang menyebutkan “*zij die het feit apxettelijk uitlakken*” (Mereka yang sengaja membujuk untuk terjadinya perbuatan).<sup>45</sup>

Menggerakkan tersebut harus menggunakan sarana-sarana (upaya-upaya) seperti tersebut dalam undang-undang. Menggerakkan orang lain untuk berbuat tidak senantiasa disebut “membujuk” tergeraknya orang untuk melakukan tindak pidana atau timbulnya pikiran seseorang untuk berbuat tersebut, karena orang lain itu, dapat disebabkan oleh banyak hal. Andi Kusuma turut serta melakukan tindak pidana menggelapkan mobil tersebut karena ada janji dari pelaku tindak pidana akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan yang akhirnya hanya digadaikan saja. Hal ini berarti bahwa unsur barang siapa yaitu pelaku tindak pidana menggadaikan mobil sewa telah terpenuhi, yaitu M. Ubaidillah Effendi dan Agus Sumaryanto sebagai pelaku tindak pidana menggadaikan mobil sewa dan Andi Kusuma sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana menggadaikan mobil.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 45.

Mobil yang digadaikan oleh M. Ubaidillah Effendi dan Agus Sumaryanto adalah milik Cycilia Cyntia Soemamo, yang ada pada M. Ubaidillah Effendi dan Agus Sumaryanto didasarkan atas perjanjian sewa menyewa. Sebagai penyewa M. Ubaidillah Effendi dan Agus Sumaryanto mempunyai hak untuk menikmati barang sewa dalam hal ini mobil selama masa sewa. Apabila M. Ubaidillah Effendi dan Agus Sumaryanto memperlakukan mobil sewa seakan-akan mobil tersebut adalah miliknya kemudian menggadaikan mobil sewa tersebut, yang berarti bahwa M. Ubaidillah Effendi dan Agus Sumaryanto telah menggadaikan mobil dari hasil kejahatan (penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP). Hal ini berarti bahwa unsur diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi.

Memperhatikan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa posisi Andi Kusuma dalam tindak pidana menggadaikan mobil dalam status sewa yang berarti hasil dari kejahatan adalah sebagai pihak turut serta melakukan tindak pidana menggadaikan mobil hasil kejahatan sebagaimana pasal 480 KUHP, karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi.

### **2.3. Akibat Hukum Orang yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa (Kasus Putusan Nomor 806/Pid/B/2010/PN.Sda.)**

Pasal 480 KUHP oleh karena itu akan dibuktikan dan dipertimbangkan apakah dakwaan tersebut terbukti atau tidak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Barang siapa :

Adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dan perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sedangkan yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu terdakwa yang selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dengan demikian terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Melihat posisi dari Andi Kusuma dalam tindak pidana menggadaikan mobil sebagaimana pasal 480 KUHP tersebut posisinya hanya sebagai perantara yang menghubungkan antara M. Ubaidillah Effendi dan Agus Sumaryanto selaku penyewa dan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dengan Dwi Wahyu Faria Wanto selaku pihak penerima gadai, sehingga seharusnya pengertian barang siapa dalam pasal 480 KUHP adalah ditujukan kepada Dwi Wahyu Faria Wanto bukan ditujukan kepada Andi Kusuma, sehingga unsur barang siapa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal 480 KUHP tidak terpenuhi;

Unsur mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang service AC dan terdakwa dalam proses gadai ini hanya sebagai



perantara meskipun telah mengetahui bahwa mobil yang digadaikan tersebut adalah mobil dari persewaan mobil dengan maksud agar mendapatkan keuntungan. Dengan demikian unsur mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya barang itu diperoleh dari hasil kejahatan tidak terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimana yang satu dan lainnya saling berhubungan ternyata unsur-unsur pasal 480 ayat 2 KUHP, semuanya tidak terpenuhi menurut hukum oleh karena itu terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut, maka seharusnya hakim membebaskan Andi Kusuma dari segala tuntutan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 806/Pid/B/2010/PN.Sda., yang menyatakan Andi Kusuma terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah melanggar ketentuan pasal 480 KUHP adalah tidak tepat. Dikatakan tidak tepat, karena posisi Andi Kusuma dalam pelaksanaan gadai mobil sewa tersebut bukan selaku pihak yang menggadaikan mobil sewa melainkan sebagai perantara untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 480 KUHP. Pada

kasus gadai mobil sewa tersebut pihak penyewa dan pihak yang menggadaikan mobil adalah M. Ubaidillah Effendi dan Agus Sumaryanto.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa akibat hukum orang yang menggadaikan mobil dalam status sewa kepadanya akan dikenakan sanksi sebagaimana pasal 480 ayat (2) KUHP. Sanksi tersebut diberikan kepada penerima gadai dalam hal ini adalah Dwi Wahyu Faria Wanto selaku penerima gadai bukan ditujukan kepada Andi Kusuma karena posisinya dalam gadai mobil sewa ini hanya sebagai perantara yang menghubungkan antara M. Ubaidillah Effendi dan Agus Sumaryanto dengan Dwi Wahyu Faria Wanto. Posisi Andi Kusuma ini sebagai perantara dan ikutserta mendapatkan bagian dari uang sewa sehingga Andi Kusuma dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk pihak yang turut serta melakukan tindak pidana menggadaikan mobil dalam status sewa sebagaimana pasal 480 KUHP.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam menggadaikan mobil tersebut, pelaku yang menggadaikan mobil adalah M. Ubaidillah Effendi dan Agus Sumaryanto serta Andi Kusuma, yang masing-masing telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 480 KUHP. Andi Kusuma melakukan tindak pidana turut serta menggadaikan mobil dari hasil kejahatan, sebagai pihak yang disuruh melakukan tindak pidana

### **BAB III**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG TELAH MENGGAJAKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA**

### **3.1. Pertanggungjawaban Pidana Orang yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa (Putusan No. 806/Pd/B/2010/PN.Sda)**

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa Andi Kusuma terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana pasal 480 ayat (2) KUHP adalah telah tepat, meskipun posisi Andi Kusuma dalam kasus gadai ini sifatnya sebagai perantara dari M. Ubaidillah Effendi dan Agus Sumaryanto selaku penyewa dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

Unsur-unsur yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana**

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum "*wederrechtelijkheid*" sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan, harus dilepas dari tuntutan hukum (*onstlag van recht-vervolging*). Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan

adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.

## **2. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab**

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

1. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Sedangkan batasan-batasan mengenai pembuat perbuatan pidana (*dader*) dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut KUHP adalah:

- 1) kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (pasal 44 ayat (1) KUHP);
- 2) anak yang belum dewasa (pasal 45 KUHP).

Dengan dasar ketentuan KUHP tersebut di atas, maka pembuat perbuatan pidana (*dader*) tidak termasuk mempunyai pertanggungjawaban pidana dalam melakukan perbuatan pidana. Penerima gadai yang menjadikan gadai sebagai suatu kebiasaan atau matapencaharian sehingga penerima gadai mempunyai kemampuan untuk membedakan antara obyek yang dapat dibebani gadai maupun yang tidak dapat dibebani gadai.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu unsur pelaku dapat bertanggungjawab secara pidana adalah pelaku yang mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

### **3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan**

Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan atau “*schuld*” merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non fasit reum nisi mens sit rea*). Menurut Moeljatno, perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan jika orang dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu:

- 1) kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*);
- 2) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>46</sup>

Dwi Wahyu Faria Wanto selaku penerima gadai telah mengetahui bahwa mobil yang dijadikan obyek gadai merupakan hasil kejahatan, namun tetap menerima obyek gadai yang didapat dari hasil kejahatan tersebut. Hal ini berarti bahwa tindakan penerima gadai tersebut termasuk dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (2) KUHP. Penerima gadai dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Gadai mobil yang didapat dari hasil kejahatan telah diketahui oleh masyarakat luas terutama dirasakan oleh rentcar, tetapi kenyataannya penerima gadai tetap mengabaikannya, sehingga unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mempunyai suatu bentuk kesalahan telah terpenuhi.

#### **4. Tidak adanya alasan pemaaf**

Menurut Sudarto, alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau tidak dipidananya, karena 2 hal:

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 167.

Perbuatan meskipun telah mencocoki rumusan delik, namun tidak merupakan suatu tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum (ingat ajaran sifat melawan hukum yang formil dan materiil); meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, namun orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena padanya tidak ada kesalahan.

Berhubung adanya dua hal di atas, maka ilmu pengetahuan hukum pidana membedakan adanya alasan pembeda, dan alasan pemaaf.

Mengenai alasan pembeda dan pemaaf, sebenarnya perbedaan ini tidak penting bagi si pembuat sendiri, karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidana, maka terangnya ia tidak akan dipidana.

Perbuatan meskipun telah mencocoki rumusan delik, namun tidak merupakan suatu tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum (ingat ajaran sifat melawan hukum yang formil dan materiil), meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, namun orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena padanya tidak ada kesalahan. Perbuatan penerima gadai telah memenuhi rumusan pasal 480 ayat (2) KUHP, karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana; mampu bertanggungjawab; mempunyai suatu bentuk kesalahan, dan penerima gadai tidak dalam kondisi sakit jiwa atau jiwanya terganggu sebagaimana pasal 44 KUHP, menerima gadai dari hasil kejahatan tidak dalam keadaan memaksa sebagaimana pasal 48 KUHP dan tidak dalam kondisi pelaksanaan jabatan, sehingga unsur pertanggungjawaban pidana yaitu tidak adanya alasan pemaaf telah terpenuhi.

### **3.2. Analisa Pertanggungjawaban Pidana Orang yang Menggadaikan Mobil**

#### **Dalam Status Sewa**

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa Andi Kusuma terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana pasal 480 ayat (2) KUHP adalah telah tepat, meskipun posisi Andi Kusuma dalam kasus gadai ini sifatnya sebagai perantara dari M. Ubaidillah Effendi dan Agus Sumaryanto selaku penyewa dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

Hal tersebut bisa dianalisa dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana**

Andi Kusuma didakwa oleh jaksa penuntut umum sebagai pihak pemberi gadai mobil sebenarnya telah mengetahui bahwa obyek gadai dalam hal ini adalah mobil tersebut adalah hasil kejahatan, karena selain nama yang tercantum dalam STNK bukan nama pihak pemberi gadai dan mengetahui bahwa mobil yang digadaikan tersebut adalah mobil yang disewa oleh M. Ubaidillah Effendi dan Agus sumaryanto, jika digunakan sebagai jaminan utang tidak harus menyerahkan mobil secara fisik disertai dengan STNK-nya, melainkan cukup dengan menyerahkan BPKB dan yang menyerahkan BPKB sebagai jaminan tersebut adalah orang yang namanya tercantum dalam BPKB atau membawa surat kuasa dari orang yang namanya tercantum dalam BPKB. Oleh karenanya jika Andi Kusuma bersedia menjadi perantara



dalam gadai mobil dengan penyerahan mobil secara fisik disertai STNK adalah telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggadaikan obyek gadai yang diperoleh dari kejahatan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana, sehingga unsur pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana telah terpenuhi.

## **2. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab**

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu unsur pelaku dapat bertanggungjawab secara pidana adalah pelaku yang mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, sehingga jika Andi Kusuma bersedia sebagai perantara untuk menggadaikan mobil sebagai obyek gadai dengan penyerahan secara fisik mobil tersebut disertai STNK yang namanya tidak sama dengan nama pemberi gadai, seharusnya Andi Kusuma menolak atau tidak bersedia sebagai perantara menggadaikan mobil tersebut, namun jika membebankan gadai maka Andi Kusuma mampu bertanggungjawab, sehingga unsur untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab telah terpenuhi.

## **3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan**

Andi Kusuma telah mengetahui bahwa mobil yang dijadikan obyek gadai merupakan hasil kejahatan, namun tetap bersedia sebagai perantara untuk menggadaikan mobil yang didapat dari hasil kejahatan tersebut. Hal ini

berarti bahwa tindakan Andi Kusuma tersebut termasuk dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (2) KUHP. Andi Kusuma dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Gadai mobil yang didapat dari hasil kejahatan telah diketahui oleh masyarakat luas terutama dirasakan oleh rentcar, tetapi kenyataannya Andi Kusuma tetap mengabaikannya, sehingga unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mempunyai suatu bentuk kesalahan telah terpenuhi.

#### **4. Tidak adanya alasan pemaaf**

Perbuatan meskipun telah mencocoki rumusan delik, namun tidak merupakan suatu tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum (ingat ajaran sifat melawan hukum yang formil dan materiil), meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, namun orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena padanya tidak ada kesalahan. Perbuatan Andi Kusuma telah memenuhi rumusan pasal 480 ayat (2) KUHP, karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana; mampu bertanggungjawab; mempunyai suatu bentuk kesalahan, dan Andi Kusuma tidak dalam kondisi sakit jiwa atau jiwanya terganggu sebagaimana pasal 44 KUHP, menerima gadai dari hasil kejahatan tidak dalam keadaan memaksa

sebagaimana pasal 48 KUHP dan tidak dalam kondisi pelaksanaan jabatan, sehingga unsur pertanggungjawaban pidana yaitu tidak adanya alasan pemaaf telah terpenuhi.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana terurai di atas yang berkaitan dengan tanggungjawab pidana usaha gadai yang menerima mobil sebagai obyek gadai secara fisik dapat dijelaskan bahwa mobil sebenarnya tidak dapat digunakan sebagai obyek gadai jika mobil harus diserahkan secara fisik disertai dengan STNK-nya, melainkan menggunakan lembaga jaminan fidusia. Obyek gadai berupa mobil tersebut diperoleh pemberi gadai dari hasil kejahatan dan Andi Kusuma mengetahuinya karena nama yang tercantum dalam STNK berbeda dengan nama pemberi gadai dan tidak ada surat kuasa dari nama yang tertera dalam STNK. Andi Kusuma menjadikan usaha sebagai perantara gadai sebagai suatu kebiasaan, yang berarti bahwa tindakan Andi Kusuma tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana pasal 480 ayat (2) KUHP. Sebagai pelaku tindak pidana, pelaku Andi Kusuma mampu bertanggungjawab, karena tindakannya telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana; untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab; mempunyai suatu bentuk kesalahan; tidak adanya alasan pemaaf. Andi Kusuma atas obyek yang diperoleh dari kejahatan sebagai suatu usaha, sehingga sebagai salah satu penyebab timbulnya kejahatan yang sangat meresahkan bagi usaha

persewaan mobil atau *rentcar*, untuk itu perlu adanya suatu penanganan khusus atas mata rantai gadai mobil sewa tersebut terputus.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hal gadai mobil sewa sebagaimana tersebut dalam pasal 480 KUHP, tidak menempatkan Andi Kusuma sebagai pelaku tindak pidana memberikan gadai melainkan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 480 KUHP. Oleh karena itu jika Andi Kusuma didakwa sebagai pelaku tunggal atas pelanggaran pasal 480 KUHP adalah tidak tepat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Akibat hukum bagi orang yang menggadaikan mobil dalam status sewa dapat dikenakan sanksi pidana karena telah melakukan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Penyewa mobil hanya memiliki hak untuk menikmati mobil sewa, kenyataannya penyewa memperlakukan mobil sewa sebagaimana miliknya sendiri menggadaikan mobil sewa tersebut.
- b. Pertanggungjawaban pidana orang yang telah menggadaikan mobil dalam status sewa, bahwa pihak yang menggadaikan dikenakan sanksi pidana sebagaimana pasal 480 KUHP yaitu menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pihak yang menyewa mengetahui bahwa mobil tersebut bukan miliknya sendiri, melainkan milik yang menyewakan sehingga telah melakukan kesalahan. Oleh karena itu pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tidak ada alasan pemaaf atau pembeda menggadaikan mobil sewa.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan jawaban permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka disarankan sebagai berikut:

- a. Hendaknya pihak yang menyewakan mobil mengecek kebenaran alamat penyewa dengan mencocokkan Kartu Tanda Penduduk dengan perangkat desa setempat yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk tentang kebenarannya, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk untuk mobil sewa bukan untuk dinikmati melainkan disewakan.
- b. Hendaknya penegak hukum memberikan sanksi yang berat kepada pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pasal 480 ayat (2) KUHP agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi, serta pihak lain tidak melakukan hal yang sama, mengingat penyewa mobil tersebut telah ada niat bukan untuk dinikmati melainkan untuk digadaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Raja Rafindo Persada, Jakarta, 2000
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHM-PTM, Jakarta, 1982
- Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1999
- Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Editor Penterjemah), Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, Tahun 1983
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004
- Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan yang Didambakan)*, Alumni, Bandung, 2004
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1997